

Rekonstruktif: Kritik Terhadap Positivisme dalam Filsafat Ilmu dan Relevansinya untuk Perkembangan Studi Administrasi Publik

Yelvi Oktavia¹, Azmi Fitriasia², Siti Fatimah³

^{1,2,3} Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Indonesia

E-mail: yelvioktavia@student.unp.ac.id¹, azmifitrisia@fis.unp.ac.id², sitifatimah@fis.unp.ac.id³

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 04-04-2024	Direview: 17-05-2024	Publikasi: 30-06-2024

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kritik terhadap positivisme dalam filsafat ilmu dan relevansinya untuk perkembangan ilmu administrasi publik. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur untuk menyelidiki konsepsi positivisme, kritik terhadapnya, dan penerapannya dalam administrasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam konteks administrasi publik, kompleksitas fenomena tidak dapat direduksi secara sederhana oleh pendekatan positivisme. Oleh karena itu, pendekatan rekonstruktif muncul sebagai alternatif yang menarik, menawarkan perspektif yang lebih holistik, interpretatif, dan kritis dalam memahami fenomena dan praktik administrasi publik. Penerapan pendekatan rekonstruktif dalam studi administrasi publik melibatkan analisis kritis terhadap institusi dan kebijakan, studi kasus berbasis interpretatif, analisis kekuasaan dan kepentingan, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan administrasi publik.

Kata Kunci: positivisme; filsafat ilmu; administrasi publik

Abstract

This article aims to explore criticisms of positivism in the philosophy of science and its relevance to the development of public administration science. The study employs a descriptive-qualitative approach through a literature review to investigate the conception of positivism, its criticisms, and its application in public administration. The results indicate that in the context of public administration, the complexity of phenomena cannot be simply reduced by positivist approaches. Therefore, the reconstructive approach emerges as an intriguing alternative, offering a more holistic, interpretative, and critical perspective in understanding phenomena and practices in public administration. The application of the reconstructive approach in public administration studies involves critical analysis of institutions and policies, interpretative case studies, analysis of power and interests, and collaboration among stakeholders in the policy-making and implementation processes.

Keywords: positivism; philosophy of science; public administration

1. Pendahuluan

Sejak awal abad ke-20, paradigma positivisme telah menjadi pijakan utama dalam evolusi ilmu pengetahuan (Triono et al., 2020). Hal ini bermula pada perkembangan yang pesat terhadap ilmu pengetahuan. Munculnya istilah positivis adalah istilah menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu empiris sebagai salah satu sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme sebagai aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif (Anshari, 1987). Positivisme menempatkan penekanan yang kuat pada metode ilmiah yang berbasis pada observasi empiris, pengujian hipotesis, dan generalisasi hukum-hukum alam. Pada dasarnya, positivisme berpendapat bahwa pengetahuan hanya dapat dihasilkan melalui proses observasi dan pengukuran yang dapat diverifikasi secara empiris (Sarumpaet, 2024; Sitabuana & Adhari, 2020). Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang

kokoh untuk pengembangan pengetahuan, terutama dalam ilmu alam, di mana fenomena dapat diamati secara langsung dan diukur dengan akurasi (Solehudin et al., 2021).

Positivisme dikenalkan oleh Auguste Comte (1798-1857) yang dilahirkan di Montpellier pada tahun 1798 dari keluarga pegawai negeri yang beragama Katolik. Karya utama A. Comte adalah *Cours de Philosophie Positive*, Kursus tentang Filsafat Positif (1830-1842) yang diterbitkan dalam enam jilid. Selain itu, karyanya inilah Comte menguraikan secara singkat pendapat-pendapat positivis, hukum tiga stadia, klasifikasi ilmu-ilmu pengetahuan dan bagan mengenai tatanan tiga dan kemajuan. Hukum tiga zaman ini tidak saja berlaku bagi manusia sebagai anak manusia berada pada zaman teologis, pada masa remaja ia masuk zaman metafisis dan pada masa dewasa ia memasuki zaman positif. Demikian pula ilmu pengetahuan berkembang mengikuti tiga zaman yang akhirnya mencapai puncak kematangannya pada zaman positif (Bartens, 1983).

Meskipun paradigma positivisme telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, akan tetapi pendekatan ini tidak lepas dari kritik, terutama dalam pandangan filsafat ilmu (Masuku, 2023). Beberapa tokoh yang fokus mengkritik positivisme diantaranya Auguste Comte, filsuf Perancis yang merupakan pendiri aliran positivisme, tetapi ia juga mengkritik positivisme secara ekstrem (Nugroho, 2016); John Stuart Mill, filsuf dan ekonom yang mengkritik positivisme karena ia tidak meluaskan hukum dan etika kepada perspektif yang lebih luas (Nugroho, 2016); Karl Popper, filsuf yang mengkritik positivisme karena ia tidak dapat menjelaskan teori-teori yang dapat diuji dan disetujui (Sundaro, 2022); dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt, yaitu sebuah aliran kritikilmiah yang mengkritik positivisme karena ia tidak mencakup aspek moral dan etis dalam pengembangan ilmu (Fajarni, 2022).

Semua tokoh tersebut di atas, mengkritik positivisme karena ia tidak mencakup aspek moral, etis, dan kritik dalam pengembangan ilmu. Kritiknya berfokus pada upaya mencakup aspek lebih luas dalam pengembangan ilmu, yang tidak hanya fokus pada fakta, tetapi juga pada aspek moral, etis, dan kritik. Kritiknya ini menyoroti keterbatasan positivisme dalam memahami kompleksitas fenomena sosial, politik, dan budaya. Salah satu argumen utama adalah bahwa positivisme cenderung mengabaikan dimensi subjektif, interpretatif, dan kontekstual dalam proses pembentukan pengetahuan. Artinya, pendekatan ini cenderung mengabaikan peran penting dari perspektif individu, interpretasi budaya, dan konteks sosial dalam memahami fenomena yang lebih kompleks (Wahono, 2023).

Pertanyaan pun muncul tentang kemampuan paradigma positivisme untuk menjelaskan realitas yang kompleks dan bervariasi di luar domain ilmu alam. Bagaimana paradigma ini bisa menerapkan prinsip-prinsipnya yang berbasis pada observasi empiris dalam konteks fenomena sosial yang seringkali tidak dapat diukur secara langsung? Bagaimana paradigma ini menangani kompleksitas dalam pengetahuan yang melibatkan aspek-aspek subjektif, interpretatif, dan kontekstual?

Namun, relevansi dari kritik terhadap positivisme tidak hanya terbatas pada domain filsafat ilmu. Bidang ilmu administrasi publik, yang secara luas terlibat dalam studi tentang organisasi, kebijakan, dan pelayanan publik, juga dipengaruhi oleh paradigma positivisme (Fauzan, 2018). Pertanyaan pun muncul apakah pendekatan positivis cukup relevan untuk memahami dan mengelola kompleksitas dalam administrasi publik yang melibatkan aspek-aspek subjektif, interpretatif, dan kontekstual?

Argumentasinya bahwa ini tidak cukup, butuh pendekatan dan keberagaman perspektif. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kritik terhadap positivisme dalam filsafat ilmu dan relevansinya untuk perkembangan ilmu administrasi publik. Dengan menyatukan perspektif filsafat ilmu dengan konteks administrasi publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dalam pembentukan pengetahuan serta implikasinya bagi perkembangan teori dan praktik dalam administrasi publik (Fauzan, 2018).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2020) menyeluruh tentang konsepsi positivisme, kritik terhadapnya dalam filsafat ilmu, dan penerapannya dalam konteks administrasi publik. Penggunaan metode penelitian analisis deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya dilakukan secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata

Penulisan dan pencarian data serta informasi didapatkan melalui dokumen-dokumen, terutama sekali dokumen tertulis berupa karya tulis akademik. Sumber-sumber tersebut dapat diakses melalui beragam tempat (perpustakaan) dan media internet secara terbuka (Ramdhan, 2021). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah (*library research*) (Ishaq, 2015; Miles & Huberman, 1992) yang relevan untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pendekatan Positivisme

Selama beberapa abad terakhir, terutama menjelang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, positivisme telah mengukuhkan posisinya sebagai pendekatan dominan dalam filsafat ilmu. Positivis merupakan istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme ialah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif artinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia (Anshari, 1987).

Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Maka filsafat pun harus meneladani contoh itu. Oleh karena itu, pulalah positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Menyakan "hakikat" benda-benda atau "penyebab yang sebenarnya", termasuk juga filsafat, hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Tugas khusus filsafat ialah mengordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan, yang beraneka ragam coraknya. Tentu saja, maksud positivisme berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh empirisme. Positivisme pun mengutamakan pengalaman. Hanya saja, berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman batiniah atau subjektif sebagai sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah tersebut. Ia hanya mengandalkan fakta-fakta belaka (Prajna, 2003).

Auguste Comte, sebagai tokoh pendiri positivisme, bersama dengan sejumlah tokoh penting lainnya seperti Ernst Mach, Bertrand Russell, dan Ludwig Wittgenstein, memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan dan penyebaran positivisme. Auguste Comte, sebagai tokoh pendiri positivisme memperkenalkan pendekatan positivisme sebagai cara untuk memahami masyarakat melalui ilmu pengetahuan (O. Hasbiansyah, 2000). Comte memandang masyarakat sebagai entitas yang bisa dipahami melalui prinsip-prinsip ilmiah, sama seperti ilmu alam. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa penelitian sosial harus berdasarkan observasi empiris dan analisis (OhBegitu/OhPedia, 2023). Selain itu, Comte juga memperkenalkan konsep "positivisme" sebagai aliran pemikiran yang mendorong ilmu pengetahuan untuk berlandaskan pada fakta dan metode ilmiah. Positivisme ini menjadi landasan bagi berbagai disiplin ilmu untuk mendekati dan memahami realitas dengan lebih objektif. Dengan kontribusinya, Comte memperkuat posisi positivisme sebagai pendekatan utama dalam pemikiran ilmiah. Positivisme ini menjadi landasan bagi berbagai disiplin ilmu untuk mendekati dan memahami realitas dengan lebih objektif (O. Hasbiansyah, 2000). Dengan demikian, pengaruh mereka membantu memperkuat posisi positivisme sebagai pendekatan utama dalam pemikiran ilmiah.

Positivisme memiliki dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah, yang meningkatkan legitimasinya dalam memahami dunia secara umum. Pengaruh positivisme terasa juga dalam pengembangan metode penelitian ilmiah, terutama dalam ilmu sosial. Pendekatan positifis menekankan pentingnya penggunaan observasi empiris, pengukuran, dan generalisasi dalam membangun pengetahuan, yang kemudian memengaruhi metodologi penelitian di berbagai disiplin ilmu. Positivisme cenderung mereduksi kompleksitas fenomena menjadi struktur yang lebih sederhana dan dapat diukur. Ini memudahkan dalam mengklasifikasikan dan menjelaskan berbagai fenomena, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan alam, yang membuatnya semakin dominan (Nugroho, 2016). Metodologi penelitian kualitatif juga memiliki pandangan positivisme, yang identifikasi "masalah" yang dapat diatasi dengan institusi top-down, diskrit dan praktek-praktek "rasional". Pada saat ini, paradigma positivisme masih sangat aktif dan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Positivisme memiliki kekuatan dalam menjelaskan fenomena alamiah melalui metode empiris, yang membuatnya lebih objektif dan terstruktur (Sundaro, 2022).

Selain itu, positivisme juga dominan dalam pendidikan tinggi dan penelitian, khususnya dalam bidang-bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, dan administrasi publik. Pendekatan positivis dianggap sebagai standar emas dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan dan objektif, yang menjadikannya sebagai pilihan utama dalam dunia akademis. Selain itu, positivisme telah mengandung dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah, yang meningkatkan legitimasinya dalam memahami dunia secara umum. Positivisme cenderung mereduksi kompleksitas fenomena menjadi struktur yang lebih sederhana dan dapat diukur, yang memudahkan dalam mengklasifikasikan dan menjelaskan berbagai fenomena, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan alam (Surawardi & Maulidi, 2022).

Metodologi penelitian kualitatif juga memiliki pandangan positivisme, yang mengidentifikasi "masalah" yang dapat diatasi dengan institusi top-down, diskrit dan praktek-praktek "rasional". Pada saat ini, paradigma positivisme masih sangat aktif dan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Positivisme memiliki kekuatan dalam menjelaskan fenomena alamiah melalui metode empiris, yang membuatnya lebih objektif dan terstruktur. Selain itu, positivisme telah mengandung dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah, yang meningkatkan legitimasinya dalam memahami dunia secara umum. Pendekatan positivis menekankan pentingnya penggunaan observasi empiris, pengukuran, dan generalisasi dalam membangun pengetahuan, yang kemudian memengaruhi metodologi penelitian di berbagai disiplin ilmu (Sundaro, 2022).

Positivisme cenderung mereduksi kompleksitas fenomena menjadi struktur yang lebih sederhana dan dapat diukur. Ini memudahkan dalam mengklasifikasikan dan menjelaskan berbagai fenomena, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan alam, yang membuatnya semakin dominan. Metodologi penelitian kualitatif juga memiliki pandangan positivisme, yang mengidentifikasi "masalah" yang dapat diatasi dengan institusi top-down, diskrit dan praktek-praktek "rasional". Pada saat ini, paradigma positivisme masih sangat aktif dan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Positivisme memiliki kekuatan dalam menjelaskan fenomena alamiah melalui metode empiris, yang membuatnya lebih objektif dan terstruktur (Surawardi & Maulidi, 2022).

b. Kritik Terhadap Pendekatan Positivisme

Kritik terhadap positivisme dalam filsafat ilmu menyoroti sejumlah keterbatasan paradigma ini dalam menjelaskan fenomena kompleks dalam realitas sosial, politik, dan budaya. Secara khusus, positivisme cenderung mengutamakan pengamatan empiris dan generalisasi universal, yang terkadang tidak cukup untuk mengakomodasi kompleksitas fenomena di dunia nyata. Ini terutama berlaku dalam konteks administrasi publik, dimana keputusan dan tindakan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak hanya dapat diukur secara empiris, tetapi juga oleh dimensi subjektivitas, konteks, dan interpretasi yang lebih luas.

Beberapa kritik umum terhadap positivisme mencakup keterbatasannya dalam menjelaskan fenomena kompleks. Positivisme dengan penekanan pada observasi empiris, cenderung mengabaikan kompleksitas fenomena sosial, politik, dan budaya yang tidak dapat direduksi menjadi struktur sederhana yang dapat diukur. Kompleksitas ini sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan interpretatif untuk memahaminya dengan baik. Sedangkan beberapa tokoh yang fokus mengkritik positivisme diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, Auguste Comte. Seorang filsuf Perancis yang merupakan pendiri aliran positivisme, tetapi ia juga mengkritik mereka yang menekankan positivisme secara ekstrem. Comte mengingatkan kita tidak harus hanya fokus pada fakta, tetapi juga harus mengingatkan kita tentang bagian dari kehidupan yang tidak dapat diukur atau dihitung (Nugroho, 2016).

Kedua, John Stuart Mill: Seorang filsuf dan ekonom yang mengkritik positivisme karena ia tidak meluas hukum dan etika kepada perspektif yang lebih luas. Mill mengingatkan kita harus mencakup aspek moral dan etis dalam pengembangan ilmu (Nugroho, 2016).

Ketiga, Karl Popper. Seorang filsuf yang mengkritik positivisme karena ia tidak dapat menjelaskan teori-teori yang dapat diuji dan disetujui. Popper mengingatkan kita harus mencakup aspek kritik dan pengujian dalam pengembangan ilmu. Thomas Kuhn merupakan seorang filsuf yang mengkritik positivisme karena ia tidak dapat menjelaskan bagaimana ilmu sosial berbeda dengan ilmu alam. Kuhn mengingatkan kita tentang bagian dari ilmu sosial yang tidak dapat diuji empiris (Sundaro, 2022).

Keempat, Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Sebuah aliran kritik ilmiah yang mengkritik positivisme karena ia tidak mencakup aspek moral dan etis dalam pengembangan ilmu. Teori Kritis Mazhab Frankfurt mengingatkan kita harus mencakup aspek kritik dan pengujian dalam

pengembangan ilmu (Fajarni, 2022). Semua tokoh ini mengkritik positivisme karena ia tidak mencakup aspek moral, etis, dan kritik dalam pengembangan ilmu. Mereka mengingatkan kita harus mencakup aspek lebih luas dalam pengembangan ilmu, yang tidak hanya fokus pada fakta, tetapi juga pada aspek moral, etis, dan kritik.

Terakhir, kurangnya kesadaran akan konstruksi pengetahuan menjadi fokus kritik lainnya. Positivisme cenderung mengabaikan bahwa pengetahuan itu sendiri dapat dikonstruksi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan holistik diperlukan untuk memahami fenomena sosial, politik, dan budaya secara lebih baik. Kritik-kritik ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kompleksitas, subjektivitas, dan konteks dalam memahami fenomena sosial, politik, dan budaya. Pendekatan yang lebih inklusif dan holistik seringkali dianggap lebih relevan dalam konteks seperti administrasi publik, di mana keputusan dan tindakan harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang realitas yang kompleks dan seringkali ambigu (Sanusi, 2023).

c. Dari Positivistik ke Rekonstruksif Studi Administrasi Publik

Kritik terhadap positivisme tidak hanya memiliki relevansi yang signifikan dalam kerangka filsafat ilmu secara umum, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik, sebagai disiplin yang berurusan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik, terlibat dalam dinamika sosial, politik, dan budaya yang sangat kompleks. Dengan demikian, kritik terhadap positivisme secara langsung mencerminkan tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh ilmu administrasi publik.

Berikut adalah beberapa implikasi penting dari kritik terhadap positivisme dalam konteks ilmu administrasi publik. **Pertama**, kompleksitas realitas administrasi publik menjadi sorotan utama. Administrasi publik melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pembuatan kebijakan publik hingga manajemen organisasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Tahir, 2011). Paradigma positivisme, yang cenderung mengabaikan aspek-aspek subjektif dan interpretatif, tidak selalu mampu menjelaskan secara menyeluruh kompleksitas fenomena dalam administrasi publik.

Kedua, pentingnya memahami konteks dan interpretasi menjadi perhatian yang muncul dari kritik terhadap positivisme. Administrasi publik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dan interpretatif yang tidak dapat diabaikan. Memahami konteks sosial, politik, dan budaya dalam administrasi publik membantu meningkatkan efektivitas dan relevansi teori dan praktik administrasi publik dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Ketiga, keterbatasan pendekatan empiris menjadi kritik yang signifikan terhadap positivisme dalam konteks administrasi publik. Pendekatan positivis cenderung mengandalkan data empiris dan generalisasi universal, yang sering kali tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas realitas administrasi publik (Tahir, 2011). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif untuk memahami fenomena dalam administrasi publik secara lebih baik.

Keempat, meningkatkan efektivitas dan relevansi teori dan praktik administrasi publik menjadi tujuan yang penting dalam menghadapi kritik terhadap positivisme. Pengabaian terhadap aspek subjektif dan interpretatif dalam administrasi publik dapat mengurangi efektivitas dan relevansi teori dan praktik tersebut. Dengan memperhitungkan kritik terhadap positivisme, ilmu administrasi publik dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan untuk mengatasi kompleksitas realitas yang dihadapinya.

Dengan demikian, kritik terhadap positivisme membawa implikasi penting bagi ilmu administrasi publik dengan menyoroti pentingnya memahami kompleksitas, subjektivitas, dan interpretasi dalam konteks administrasi publik yang dinamis. Dengan memperhitungkan kritik-kritik ini, ilmu administrasi publik dapat lebih baik memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapinya dalam masyarakat modern.

Pendekatan rekonstruktif muncul sebagai alternatif yang menarik dalam studi administrasi publik, menawarkan perspektif yang berbeda dari pendekatan positivis yang lebih tradisional. Pendekatan ini menawarkan beberapa poin yang penting tentang bagaimana pendekatan ini dapat menjadi relevan dalam memahami administrasi publik secara lebih holistik. **Pertama**, pendekatan rekonstruktif menempatkan fokus pada konstruksi sosial dari realitas sosial, termasuk administrasi publik. Ini berarti bahwa realitas administrasi publik tidak hanya ditemukan secara objektif, tetapi juga dikonstruksi oleh individu dan kelompok dalam masyarakat.

Pandangan ini menegaskan bahwa realitas administrasi publik dipengaruhi oleh berbagai pandangan, nilai, dan interpretasi yang berbeda (Nugraha et al., 2022).

Kedua, pendekatan ini melibatkan analisis kritis terhadap kekuasaan, struktur sosial, dan hubungan kekuatan dalam administrasi publik. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dinamika kekuasaan dan dominasi yang mungkin ada dalam kebijakan, praktik, dan institusi administrasi publik. Pendekatan rekonstruktif juga cenderung mengadopsi pendekatan interpretatif dalam memahami administrasi publik. Artinya, peneliti tidak hanya berusaha untuk mengamati dan mengukur fenomena, tetapi juga untuk memahami makna yang tersembunyi di balik praktik dan kebijakan administrasi (Tahir, 2011).

Ketiga, pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi publik dan dialog antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan administrasi publik. Ini menciptakan ruang untuk pengakuan multiple perspektif dan pemecahan masalah yang lebih inklusif (Astuti et al., 2020). Secara keseluruhan, pendekatan rekonstruktif menawarkan alternatif yang penting dalam studi administrasi publik dengan menyoroti kompleksitas, subjektivitas, dan konstruksi sosial dari realitas administrasi. Ini dapat membantu memperluas pemahaman tentang dinamika administrasi publik, serta memperkuat relevansi teori dan praktik administrasi dalam menghadapi tantangan kontemporer yang kompleks dan beragam.

d. Penerapan Pendekatan Rekonstruktif dalam Studi Administrasi Publik

Penerapan pendekatan rekonstruktif dalam studi administrasi publik melibatkan serangkaian langkah dan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis administrasi publik dari sudut pandang yang lebih holistik, interpretatif, dan kritis (Alamsyah, 2019). Berikut adalah beberapa cara di mana pendekatan rekonstruktif dapat diterapkan dalam studi administrasi publik, yaitu pendekatan ini mendorong analisis kritis terhadap institusi dan kebijakan dalam administrasi publik. Ini melibatkan pertanyaan kritis tentang asal-usul, tujuan, dan dampak dari kebijakan dan institusi, serta pengidentifikasian dan pengevaluasian kekuasaan dan dinamika struktural yang mendasarinya.

Selanjutnya, pendekatan rekonstruktif dapat diterapkan dalam studi kasus berbasis interpretatif untuk memahami praktik administrasi publik dalam konteks yang lebih luas. Ini melibatkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara interpretatif untuk memahami makna dan konteks di balik praktik administrasi tertentu. Kemudian, pendekatan ini mendorong analisis kekuasaan dan kepentingan dalam administrasi publik. Ini melibatkan identifikasi aktor-aktor kunci, struktur kekuasaan, dan dinamika politik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan administrasi publik, serta analisis dampaknya terhadap distribusi keadilan dan kepentingan masyarakat (Astuti et al., 2020).

Selain itu, pendekatan rekonstruktif sering kali menggunakan teori-teori kritis, seperti teori kritis, feminisme, atau teori postkolonial, untuk menganalisis administrasi publik (Hisyam & Pamungkas, 2016). Teori-teori ini membantu mengungkap dan mengevaluasi ketidaksetaraan, dominasi, dan penindasan yang mungkin ada dalam administrasi publik, serta mencari solusi alternatif untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan.

Terakhir, pendekatan rekonstruktif mendorong partisipasi publik dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan administrasi publik. Ini menciptakan ruang untuk dialog dan pengakuan multiple perspektif, serta untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik (Sholihatin, 2012). Dengan menerapkan pendekatan rekonstruktif dalam studi administrasi publik, para peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang dinamika kompleks dan kontekstual dari administrasi publik, serta mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan, efektivitas, dan responsivitas pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek yang mungkin terlewatkan oleh pendekatan tradisional, sehingga memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik yang lebih relevan dan komprehensif.

4. Simpulan dan Saran

Paradigma positivisme dalam filsafat ilmu telah menjadi pendekatan dominan dalam menjelaskan fenomena alamiah, termasuk dalam studi administrasi publik. Namun, ada kritik yang dilontarkan terhadap pendekatan ini karena cenderung mengabaikan aspek moral, etis, serta dimensi subjektif dan kontekstual dalam pembentukan pengetahuan. Dalam konteks

administrasi publik, kompleksitas fenomena tidak dapat direduksi secara sederhana oleh pendekatan positivisme. Oleh karena itu, pendekatan rekonstruktif muncul sebagai alternatif yang menarik, menawarkan perspektif yang lebih holistik, interpretatif, dan kritis dalam memahami fenomena dan praktik administrasi publik. Penerapan pendekatan rekonstruktif dalam studi administrasi publik melibatkan analisis kritis terhadap institusi dan kebijakan, studi kasus berbasis interpretatif, analisis kekuasaan dan kepentingan, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan administrasi publik. Secara keseluruhan, pentingnya mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, interpretatif, dan kritis dalam memahami realitas yang kompleks dan beragam dalam studi administrasi publik.

5. Daftar Pustaka

- Alamsyah, K. (2019). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Anshari, E. S. (1987). *Ilmu Filsafat dan Agama*. Bina Ilmu Surabaya.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Fajarni, S. (2022). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, Dan Masyarakat Modern. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 72–95.
- Hisyam, M., & Pamungkas, C. (2016). *Indonesia, globalisasi, dan global village*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishaq. (2015). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. STAIN IAIN Kerinci Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif :Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (T. Rohendi (ed.)). Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *Teori Administrasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nugroho, I. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 167–177. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>.
- O. Hasbiansyah. (2000). Menimbang Positivisme. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 1(1), 123–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mediator.v1i1.687>.
- OhBegitu/OhPedia. (2023). Tokoh-tokoh Utama Positivisme dan Jejak Pemikiran Mereka. <https://www.ohbegitu.com/>. <https://www.ohbegitu.com/1081/tokoh-tokoh-utama-positivisme-dan-jejak-pemikiran-mereka>.
- Praja, J. S. (2003). *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika Prenada*. Pranada Media.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara.
- Sanusi, M. (2023). Telaah Epistemologi Positivisme dan Fenomenologi: (Sebuah Perbandingan). *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 2(1). <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1086>.
- Sholihatin, E. (2012). Jejaring Pemerintahan di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan. *Jejaring Administrasi Publik*, 1(1), 29–35.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sundaro, H. (2022). Positivisme dan Post Positivisme: Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perencanaan Kota dalam Tinjauan Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. *MODUL*, 22(1), 21–30. <https://doi.org/10.14710/mdl.22.1.2022.21-30>.
- Surawardi, S., & Maulidi, A. R. (2022). Filsafat Positivisme dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Pendidikan di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.9771>.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (H. Hadjarati (ed.)). PT Pustaka Indonesia Press.